BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi industri otomotif yang tumbuh dengan pesat, menjadikan persaingan di antara produsen otomotif dunia semakin ketat dalam menciptakan produk-produk yang dapat memenuhi selera pasar serta mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Produsen-produsen otomotif dunia seperti Honda, Toyota, Volkswagen, Ford, Jaguar, Rolls-Royce, Chevrolet, Dodge, Nissan dan Hyundai merupakan industri otomotif luar negeri yang telah dianggap berhasil dalam pengembangan industri dan penjualan produk ke berbagai negara di dunia.

Persaingan di antara para pemain lama industri otomotif dunia tersebut telah menekan industri otomotif dalam negeri Indonesia hingga saat ini. Industri-industri luar negeri yang menguasai pangsa pasar Indonesia di antaranya Toyota sebesar 31%, Daihatsu 17,3%, Honda 14,1%, Mitsubishi Motor 12,4% dan Suzuki 10,25% semuanya pada tahun 2018 (Mola, 2019). Angka-angka di atas menunjukkan betapa kecilnya peluang pasar yang dimiliki oleh industri otomotif domestic yang memiliki keinginan untuk dapat membuat industri otomotif nasional. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk bagaimana caranya menaikkan kembali industri otomotif domestik yang kalah saing tersebut. Berbagai perkembangan yang dilakukan sejak 1969 kemudian dilakukan pembaharuan industri, hingga mengeluarkan kebijakan industri mobil pedesaan

dengan acuan industri ini memiliki peluang untuk dikembangkan untuk dapat bersaing dalam dunia global.

Industri otomotif Indonesia berawal dari industri suku cadang untuk mobil-mobil yang diimpor secara utuh atau *Completely Build Up* atau CBU maupun *Completely-Knocked Down* atau CKD yang terjadi pada tahun 1969. Lalu pada tahun 1971 produsen otomotif dari Jepang mulai berdatangan seperti Mitsubishi Motors yang dimiliki izin pemegang mereknya oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan telah terjual sebanyak 50.000 unit pada tahun tersebut. Melihat banyaknya kendaraan yang diimpor secara CBU, pemerintah mulai mengajukan kebijkan pengurangan impor kendaraan CBU pada tahun 1974 dengan syarat bahwa perusahaan yang mengimpor kendaraan CBU diharuskan dapat melakukan perakitan sendiri dan melakukan impor utuh hanya pada mobil yang dirasa memiliki kompleksitas yang belum dapat dikerjakan atau dirakit di Indonesia (Gaikindo, 2018).

Pada tahun 1976 Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan terkenal yang disebut "Program Penanggalan Komponen", dengan tujuan salah satunya adalah mengenakan pajak impor tinggi bagi kendaraan yang belum menggunakan suku cadang dalam negeri. Kemudian program ini dikembangkan menjadi "Program Insentif" yang telah disebutkan di atas, dengan harapan bisa semakin meningkatkan produksi otomotif mulai dari produk bermotor hingga ke suku cadang dan lain-lain (Kemenkeu, 2013).

Mobil Nasional atau Mobnas adalah mobil yang diproduksi oleh negara dan diakui sebagai produk dalam negeri untuk digunakan oleh rakyat negara

tersebut dan diekspor ke negara lainnya. Industri otomotif suatu negara yang mengembangkan produksi mobil secara mandiri dan dapat diterima pasar, dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang luar biasa dan pemasukan APBN yang besar bagi negara tersebut. Sebagai contoh penjualan Mobnas asal Malaysia dengan merek Proton pada tahun 1987 memasarkan hingga 50.000 unit mobil di Malaysia, meski kemudian tergerus dengan mobil pabrikan luar dan hanya menguasai 14% pangsa pasar otomotif di tahun 2017 (Eka S, 2018).

Pada tahun 1996 pemerintah mempercepat Program Insentif terkait Mobnas, di mana pemerintah memberikan potongan maupun kebebasan dari bea impor dengan syarat komponen dari perusahaan otomotif mesti mengandung komponen lokal 20% di tahun pertama, 40% di tahun kedua dan 60% di tahun ketiga otomotif tersebut diimpor ke Indonesia (Gaikindo, 2018).

Keinginan Indonesia untuk memiliki mobil nasional semakin kuat semenjak adanya kerja sama antara Indonesia dengan industri otomotif dari Inggris yaitu Rover yang pada saat itu dikerjakan oleh B.J Habibie yaitu konsep mobil Maleo. Dengan mengambil contoh dari Rover Metro, Maleo mencoba mengembangkan kendaraan dengan basis dari Rover Metro dan pada saat itu pemerintah Indonesia berencana mengimpor Rover Metro ke Indonesia untuk dilakukan proyek Rancangan Maleo yang pada saat itu akan dirancang oleh PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) (Kuswaraharja, 2015).

Pemerintah Indonesia menginstruksikan Kementerian perdagangan (Kemendag) melalui Inpres Nomor 2 Tahun 1996 agar mewujudkan industri Mobnas dan sempat membangun industri mobil nasional dengan memproduksi

mobil yang memiliki merek Timor yang ditangani oleh Tommy Suharto, dan juga merek Maleo yang ditangani oleh B.J Habibie (Alamsyah, 2015). Namun, di perjalanan proyek ini berhenti karena krisis moneter dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan.

Setelah beberapa tahun mengalami pergantian konsep mobil nasional seperti Timor dan Maleo, Indonesia merasa perlu adanya pergantian fokus yang sebelumnya fokus kepada mobil nasional menjadi mobil pedesaan yang memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda. Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia masih berkutat dengan industri kendaraan angkutan berpenumpang dan sangat memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap mobil pedesaan yang memiliki fungsi utama untuk membawa hasil pertanian (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). Hal ini dianggap memiliki daya saing jual di dalam dan luar negeri yang cukup menjanjikan karena kurangnya produsen otomotif dunia yang melirik ke dalam sektor tersebut. Oleh karena itu hal tersebut dapat membuat Indonesia dapat bersaing dengan produsen otomotif luar yang tidak terlalu memfokuskan industrinya pada sektor tersebut sekaligus meningkatkan perindustrian otomotif Indonesia.

Wacana untuk pembuatan mobil pedesaan sudah dikemukakan pada tahun 2010 dengan spesifikasi mesin di bawah 1.000 cc dan dapat mengangkut barang dan penumpang seperti yang disampaikan oleh Budi Darmadi selaku Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi pada tahun tersebut. Pemerintah bekerjasama dengan Institut Otomotif Indonesia (IOI) dan menunjuk Made Dana

Tangkas selaku Presiden dari IOI sebagai koordinator pengembangan mobil pedesaan (Nayazri, 2016).

Melihat adanya kesempatan untuk dapat bersaing, beberapa perusahaan dalam negeri pun turut serta dalam mengembangkan mobil pedesaan seperti perusahaan PT. Fin Komodo, CV. Karya Hidup Sentosa, dan PT. Astra Otoparts Tbk. (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, -). Beberapa contoh mobil yang telah dibuat antara lain adalah Tawon dan AMMDes atau Alat Mekanis Multiguna Pedesaan yang telah dipamerkan pada acara tahunan GIIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show pada tahun 2018 (Deny, 2018).

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan wadah bagi produsen domestik untuk dapat bertahan dalam persaingan inustri otomotif global, dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pembuatan produk baru berupa mobil pedesaan. Dengan bantuan dukungan kebijakan dan kebijakan berupa proteksi terhadap produk tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi industri lokal dan dapat juga bersaing di dunia. Proteksi ini perlu diberikan kepada industri mobil pedesaan karena industri ini masih baru dan perlu berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat dapat melindungi perkembangan industri ini sehingga kedepannya laik untuk dapat bersaing dengan industri otomotif dunia.

Untuk dalam negeri sendiri, dengan adanya program Industri mobil pedesaan ini bisa memberikan hasil yang positif bagi ekonomi negara, sejalan juga dengan kepentingan berupa profit bagi berbagai aktor bisnis yang teribat, dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan dan industri mikro kecil

menengah agar dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehari-hari, seperti bertani, berkebun dan meraih hasil panen yang efektif dengan kendaraan yang harganya terjangkau sehingga bisa menekan biaya (Purnama, 2017).

Sebagai salah satu sektor industri yang mendapatkan cukup banyak perhatian, membuat mobil pedesaan menjadi salah satu sektor yang menarik untuk diteliti. Dimulai dari cukup banyaknya perusahaan domestik yang berusaha mengembangkan produk di sektor ini hingga dukungan yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri mobil pedesaan, menunjukkan potensi yang cukup baik bagi mobil pedesaan. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintahan Indonesia, terutama pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemangku jabatan saat ini, terkait dengan pengembangan industri kendaraan pedesaan untuk pengembangan industri otomotif lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dorongan kebijakan pemerintah terhadap sektor industri mobil pedesaan pada masa Presiden Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terkait mobil pedesaan di masa Presiden Joko Widodo dan,
2. Untuk mengetahui hasil perkembangan implementasi kebijakan mobil pedesaan di era Presiden Joko Widodo

1.4 Signifikansi

- Untuk memperkaya studi mengenai ekonomi politik indonesia di sektor otomotif dan sekaligus memperkaya studi hubungan internasional.
- Melihat bagaimana Pemerintah Indonesia sebagai aktor dalam merespon kondisi pasar otomotif global.
- Untuk mengetahui implementasi strategi mobil pedesaan yang dijakalankan oleh Indonesia sebagai salah satu kebijakan pengembangan industri otomotif nasional.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, mengingat pada saat presiden Joko Widodo kebijakan mobil nasional dilaksanakan.
2. Jenis industri otomotif yang dibahas hanya industri mobil pedesaan. Hal ini karena merupakan pengembangan sektor industri otomotif baru di Indonesia dan mobil pedesaan dianggap berpotensi untuk meningkatkan persaingan industri domestik terhadap industri otomotif global sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi negara.
3. Penelitian ini hanya membahas kebijakan pemerintah terkait dengan industri mobil pedesaan, tidak sampai melihat dampak implementasinya serta perkembangannya. Hal ini untuk mengurangi melebarnya pembahasan di karenakan fokus utama adalah membahas kebijakan pemerintah saja.

1.6 Tinjauan Pustaka

Menurut Toto Suharto dalam jurnalnya yang berjudul 'Kebijakan Ekonomi Global di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan teori, problematika dan Interaksi Kebijakan Perdagangan dan Industrialisasi' menyatakan bahwa negara-negara berkembang umumnya berusaha mengembangkan industri dengan hasil produksi yang pendek dan menghemat devisa. Karena itu, pilihannya lebih pada pengembangan Industri Substitusi Impor (ISI), yang sering kali terbentur jika karena terjadi kejenuhan pada pasar dalam negeri dan *barrier* perdagangan di laur negeri. Perkembangan tahap awal industri berjalan cepat kemudian mengalami perlambatan ketika subsidi industri tersebut dicabut karena dianggap sebagai *barrier* yang dilarang dalam pasar global (Suharto, 2002, pp. 91-110). Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana Pemerintah Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong industri mobil pedesaan ini berkembang menjadi lebih baik sehingga dapat diterima di pasar global.

Dalam jurnal berjudul 'Implementasi AEC dalam Peningkatan Jaringan Produksi Regional ASEAN: Studi kasus industri otomotif' yang ditulis oleh Enggar Furi Herdianto membahas terkait bagaimana integrasi ekonomi yang diupayakan oleh ASEAN Economic Community (AEC) termasuk industri otomotif di negara-negara anggota. Upaya integrasi lebih lanjut ini akan mempermudah perputaran penjualan industri otomotif tiap negara termasuk Indonesia, meski kemudian hambatan yang muncul selanjutnya adalah tiap negara pasti akan berupaya melindungi jalur perdagangan industri nasional masing-masing (Herdianto, 2016, pp. 112-113). Dalam hal ini saya melihat apa saja

upaya-upaya Pemerintahan Joko Widodo untuk menjadikan integrasi ekonomi ini sebagai peluang bagi perkembangan industri dan penjualan mobil pedesaan.

Dalam artikel berjudul 'Perkembangan Komponen Otomotif di Indonesia' yang ditulis oleh Widy Haryono di Kemendag, menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi industri otomotif dunia hal ini juga berpengaruh di Indonesia. Perkembangan ini termasuk diantaranya komponen mobil dan juga suku cadang yang pada tahun 2013 mencatat nilai ekspor sejumlah 1,42 milyar USD. Dalam artikel ini, Haryono menyebutkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan dunia akan komponen-komponen otomotif sehingga hal ini dapat dianggap sebagai sebuah peluang bagi negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemerintah melalui perusahaan seperti Astra Tbk. dan ABAI menjadi salah satu produsen pelopor menuju pasar global (Haryono, 2014). Haryono melihat mobil pedesaan juga dapat menyentuh pasar global karena masih belum banyaknya industri luar yang berfokus pada segmen tersebut.

Dalam Jurnal berjudul 'Industri Mobil Nasional : Perspektif Berlian Porter' yang ditulis oleh Elvy Maria Manurung, menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki, atau masih mencari dan menemukan 'berlian' industri dalam negeri yang unggul dan kompetitif. Namun, Indonesia sendiri dalam hal ini industri otomotif memiliki potensi untuk mengejar ketertinggalan atau menciptakan sesuatu yang bisa menimbulkan keunggulan kompetitif dalam pasar global dan hal itu adalah mobil pedesaan (Manurung, 2012). Saya melihat ada peluang untuk mobil pedesaan ini menjadi 'berlian' industri otomotif Indonesia dikarenakan masih belum banyak yang melirik pangsa pasar ini di dunia global.

Terkait kerja sama yang mesti dibangun antara negara dan aktor non negara dalam hal ini swasta, Bambang Susantono & Mohammed Ali Berawi dalam jurnal yang berjudul 'Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia'. Menyatakan bahwa sistem KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) di Indonesia diyakini sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang dari proyek tersebut. Dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dapat menjamin investasi dapat berjalan dengan baik pada proyek tersebut (Susantono & Berawi, 2012).

Dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis bagaimana kerja sama yang dibangun antara pemerintah masa Presiden Joko Widodo dengan aktor negara dalam proyek industri otomotif mobil pedesaan. Dengan adanya kontribusi dari pustaka-pustaka dan penelitian terdahulu yang ada di tinjauan pustaka ini diharapkan membantu penulis dalam menggambarkan keadaan yang saat ini dan terjadi terkait industri mobil pedesaan. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji industri mobil pedesaan dalam lingkup kebijakan era Pemerintahan Joko Widodo terkait industri otomotif. Meski begitu, masih belum banyak ditelitinya sektor industri mobil pedesaan di Indonesia kemudian mendorong penulis untuk menjalankan penelitian di sektor tersebut, yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait dengan perkembangan sektor industri mobil pedesaan di Indonesia.

1.7 Kerangka konsep atau landasan teori

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menerapkan konsep *developmental state* dalam menganalisis peran pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan industri mobil pedesaan agar dapat bersaing di dunia internasional. Teori ini sangat cocok untuk menjadi landasan dari analisis ini karena Indonesia yang merupakan negara berkembang dapat menjadi contoh dari konsep yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich yang dimana Leftwich mengungkapkan bahwa peran pemerintah dibutuhkan untuk dapat membantu pihak non-pemerintah dalam memajukan perekonomian negaranya.

Seperti yang disampaikan oleh Leftwich, sebuah negara yang ingin mencapai tujuannya itu haruslah memiliki kemampuan dan kekuasaan politik yang kuat, sumber daya yang mumpuni, dan juga memili arah yang jelas sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Peran negara inilah yang menjadi faktor penting perkembangan dan pembangunan negara tersebut, jika peran negara kurang aktif maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan semestinya. Pemerintah mempunyai kekuatan untuk mendorong pembangunan negara dengan cara menggerakkan semua aspek dan aktor di dalam negaranya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan.

Ada beberapa indikator yang dikemukakan Leftwich dalam teori *developmental state* yang telah berhasil dijalankan oleh beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yaitu:

1.7.1 *Determined Developmental Elite*

Determined Developmental Elite merupakan indikator yang dilihat melalui siapa saja aktor-aktor/elit-elit atau kelompok orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif yang ada di Indonesia terutama berkaitan dengan industri mobil pedesaan. Dilihat dari beberapa program mobil nasional yang selama ini telah berjalan, beberapa dianggap tidak berjalan dengan baik karena elit-elit yang berada di sektor swasta dan pemerintah tidak sejalan dalam hal pembangunan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah dalam hal ini Kemenperin, Gaikindo, IOI dan lainnya sebagai pihak swasta saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan dalam hal industri otomotif Indonesia. Sehingga program seperti mobil pedesaan yang telah dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian dan perusahaan swasta seperti PT. Astra Otoparts Tbk. dalam mengembangkan AMMDes bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini.

1.7.1 *Relative Autonomy of the Developmental State*

Masing-masing pemerintahan beserta jajaran elit tiap negara memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan terkait industri, namun kewenangan tersebut bersifat relatif dan seringkali memiliki batasan. Dalam hal ini seberapa jauh kewenangan pemerintah Indonesia di masa Presiden Joko Widodo beserta elit pemerintahan lainnya mengeluarkan kebijakan yang bersifat intervensi hingga dapat mempengaruhi aktor non-negara dan masyarakat untuk mendukung kebijakan industri mobil pedesaan.

1.7.2 *A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy*

Dalam *Developmental State,* akan selalu ada Badan negara yang ditunjuk untuk menjalankan strategi ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan industri

negaranya. Hal ini agar Negara mencapai tujuan pembangunan dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dan kebijakan ini harus didukung oleh orang-orang yang kompeten dalam Badan negara yang memiliki pondasi kuat. Saya akan menjabarkan badan negara apa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan kebijakan tersebut dan menjamin kelancarannya.

1.7.3 *Developmental States and Civil Society*

Untuk melihat bagaimana strategi *Developmental State* ini berjalan dapat juga dilihat dari hubungan negara dengan masyarakat. Seringkali kebijakan diambil bersifat *top-down* atau masyarakat tidak turut andil dalam perumusan kebijakan, lebih diserahkan kepada elit politik dan aktor industri swasta. Saya akan menjabarkan bagaimana pengambilan kebijakan ini dibuat dan bagaimana kaitannya dengan peran dari masyarakat atas kebijakan tersebut.

1.7.4 *The Effective Management of Non-State Economic Interest*

Di dalam strategi *Developmental State* terdapat upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara. Tekanan ini bisa berupa kebijakan-kebijakan yang malah dianggap merugikan kepentingan ekonomi aktor non-negara, namun di jangka panjang mampu memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik sektor ekonomi yang didorong pemerintah. Seperti contoh Proton di tahun 1980-an dengan kelebihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Malaysia adalah harga yang murah dibanding pesaing lain karena faktor pajak dinaikkan. Hal ini juga akan dilihat apa saja kebijakan pemerintah Indonesia yang menekan aktor-aktor non-negara namun berguna untuk perkembangan dari industri mobil pedesaan tersebut.

1.7.5 *Repression, Legitimacy, and Performance*

Di dalam hal ini melihat terkait bagaimana strategi *Developmental State* mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan. Di dalam kebijakan represif ini, memang akan memberikan tekanan dan terkadang menimbulkan adanya tentangan dari masyarakat. Namun, fokus dari poin ini adalah bagaimana kebijakan represif tersebut pada perkembangannya mampu berjalan yang kemudian menunjukkan adanya legitimasi terkait kebijakan yang dipaksakan pemerintah. Selain itu, legitimasi lainnya adalah dengan semakin meningkatnya sektor perekonomian yang didorong oleh pemerintah. Dalam kasus ini, kebijakan represif pemerintah seperti yang dijelaskan di poin-poin sebelumnya menunjukkan adanya upaya represif kepada masyarakat. Meski begitu, peraturan tersebut terlegitimasi dengan masih berjalannya kebijakan tersebut, serta dengan bukti meningkatnya pengembangan industri mobil pedesaan di Indonesia berkat paksaan yang diberikan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna melindungi serta mendorong pengembangannya. (Leftwich, 1995, hal. 405-420). Hal di atas adalah gambaran akhir dari Leftwich terhadap sebuah sikap represi negara pada masa tersebut. Namun pada saat sekarang ini tekanan terkadang perlu diberikan oleh pemerintah guna legitimasi kebijakan kepada berbagai aktor non-negara sehingga tujuan pengembangan industri otomotif dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk melihat performa dan keberhasilan dari kebijakan tersebut bisa dilihat dari berbagai indikator-indikator di lapangan seperti pengembangan produksi dan hasil penjualan.

Melihat poin-poin yang telah dijabarkan di atas, teori *Developmental State* merupakan teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini yang di mana peran dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo berperan penting dalam peningkatan pembangunan negara khususnya dalam hal industri otomotif mobil pedesaan. Selain itu, teori *developmental state* juga dapat menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat meningkatkan perekonomian negara dari tahap masyarakat dalam negeri hingga mencapai pasar global.

Melihat proses kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani industri otomotif mobil pedesaan dengan mengajak beberapa perusahaan swasta untuk dapat saling membantu dalam mengembangkan industri mobil pedesaan agar dapat bersaing secara nasional dan juga secara internasional. Hubungan yang terjalin di antara pemerintah dan pihak swasta dapat meningkatkan perekonomian negara dan mempercepat proses pembangunan Indonesia dalam bidang industri otomotif.

1.8 Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis analisis kualitatif dan deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka terhadap obyek maupun subyek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana perkembangan industri otomotif berupa Mobil Nasional atau Mobnas di indonesia, hingga berfokus di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berupaya mendorong perkembangan Mobnas tersebut.

Rumusan masalah ini nantinya akan dianalisis dan dijelaskan dengan teori *Developmental State* dari Adrian Leftwitch sehingga dapat ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

- Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah Pemerintah indonesia selaku implementator kebijakan dari mobil pedesaan dan kebijakan yang diambil dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut adalah objeknya. Untuk membantu menganalisis hal tersebut dan menjawab rumusan masalah, penulis menganalisis berdasarkan teori *Developmental State.*

- Alat pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap proses penelitian terkait kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mendorong sektor industri mobil pedesaan untuk dapat bersaing dalam pasar global.

- Proses penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Pra Riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.

2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya didasarkan pada reputasi kredibilitas media/penerbit dan hubungannya dengan topik penelitian.
3. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.